

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 157
- Adi Sujatno. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Sendiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004.
- Affan Gaffar, (2009) *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama.
- Aldi Romadhani. (Januari 2023) *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 1
- Bisri, Ilhami. 2004. *Sistem Hukum Indonesia. Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwidja Pryatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Diindonesia*, hlm 103. Diterbitkan Oleh et al., “*Penerapan Pemberian Pembebasan Bersyarat Sebagai Pemenuhan Hak Hak Narapidana*” hlm 260–65.
- E. Sumaryono, (Yogyakarta 2002) *Etika Hukum dan Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, , hal.142
- Iqbal, Muhammad Fiqh Siyasah, (2007) *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- J. Senna, J., J. And Siegel, L. (1993). *Introduction To Criminal Justice*, New York- Los Angeles-San Francisco: West Publishing Company.
- Nawawi Arief , Barda,(200) *Berberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 107
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm 295.
- Masruchin Ruba’i, dkk. (2014) *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Jakarta, hlm.149

- Muladi dan Barda Nawawi Arie, (1984) *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, Hal.10.
- Poernomo, Bambang 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, (Jakarta: CV. Indhill Co, 2007), hlm. 6
- Tolib Setiady, (2010) *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, hal. 21
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty. (2008). *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*. Jakarta: Indhill Co.
- Poernomo, Bambang, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Yogyakarta: Liberty.
- R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita. (1979). *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- R.Sugandhi, *kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, Hlm 25.
- Redaksi Ras, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010) *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*, hal. 168
- Redaksi Ras, *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*, hlm. 169
- Satochid Kartanegara, (1998) *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Hal.56
- Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sujatno, Adi. (2004). *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 34
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 521

B. Jurnal

- Aldi Romadhani. (Januari 2023) *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 1
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Sendiri*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), hlm. 18
- Ary Ardiansyah, Mitro Subroto, (2022) “*Kepada Narapidana Pidana Umum Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bengkulu*” hlm 461–75.
- Alba, A. H. (2023, Juli 07). *Batamnews*. Retrieved From *Over Kapasitas, 24 Narapidana Rutan Karimun Dipindah Ke Lapas Batam Dan Tanjungpinang*
- Delby Aprilia, “Pelaksanaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat di Terminal Purabaya”, *Jurnal Novum*, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2016.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cet Ke 2, Bandung; PT Refika Aditama, 2009, hlm 97
- Paryadi, Abdul Bari dan Said Abdullah, Juni 2015, Kajian Yuridis Pembebasan Bersyarat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo, *Jurnal Hukum Legalitas*, Volume 1, Nomor 1
- Randi Pratama Afra Dan Herry Fernandes Butar-Butar, (2021), “*Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995*” *Menara Ilmu*, Vol.15.2 Hlm 62
- Rizki Yudha Bramantyo, (2022) ‘*Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius Dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri*’, *Jurnal Transparansi Hukum*, hlm 4- 5
- Surya Ely S Risqiani Nur Badria, (jakarta timur, 2023) *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm 27.
- Sutarto, 2021 “*Penerapan rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif*”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* Volume 2, Issue 1. Hal. 125.
- Suyanto, ”*Efektivitas Pelepasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana*”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol 1., No 2., (2016), hal. 40
- Suyanto, *Efektivitas Pelepasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana*, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. V, No. 2, Desember 2016, 2016, h. 165
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

Yudistira Distri. (2021). *Pengawasan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Pakjo Palembang*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.16 (2), hlm 231-246.

Wahib, A. (2020). *Optimalisasi Pencegahan Pencemaran Minyak Dalam Implementasi Annex 1 Marpol 1973/1978 Di Mt. Enduro Pt. Pertamina (Persero)*. Karya Tulis.

Warmadewa, "Pembebasan bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana", Jurnal Analogi Hukum, Vol 1, No 3, (Januari 2019).

Zefron, Z. (2022). *Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Siak (Studi Kasus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)* (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6811).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2022) "Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022," *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*: Hlm 10–17.

Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Pemerintah No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 3 Tahun 2018 Tentang 28 Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana

Sistem Database Pemasyarakatan, 2024. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2024 pukul 14.00

Muhammad Joni, Efektifitas Penerapan Hukum (Online), <http://www.mjoni.com/opini/artikelhukum/efektifitas-penerapan-hukum.html> (diakses pada 4 mei 2025)